

## **Nomadic Tourism di Desa Canggu: Sebuah Momentum Menuju Deliberasi Kebijakan Pariwisata di Bali**

Dr. Victorious Adventius Hamel, S.Th., M.Si.  
Dosen Fisipol Universitas Warmadewa  
[victorhamel71@gmail.com](mailto:victorhamel71@gmail.com)

Anak Agung Gde Brahmantya Murti, S.IP.,MPA.  
Dosen Fisipol Universitas Warmadewa  
[brahmantyamurti@gmail.com](mailto:brahmantyamurti@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kebijakan pariwisata di Bali secara historis sangat bersifat state centered administration model. Sejak era pemerintah orde Baru model kebijakan yang dibangun tidak memberi ruang besar bagi keterlibatan masyarakat Bali secara utuh. Era reformasi seharusnya mampu mengubah hal itu semua. Desa Canggu melalui keberadaan nomadic tourism-nya telah memberi warna yang berbeda dalam membangun model kebijakan pariwisata di Bali yang lebih bernuansa community centered model. Meski belum sepenuhnya kebijakan bersifat community centered model tetapi paling tidak fenomena turisme yang terjadi di desa Canggu dengan kebijakan pemerintah desanya telah memberi indikasi adanya pola-pola deliberasi kebijakan publik yang lebih baik pada masa kini dan masa depan.*

Kata Kunci: *Kebijakan, pariwisata, deliberasi, Canggu*

### **Abstract**

*Tourism policy in Bali has historically been a state centered administration model. Since the New Order government era, the policy model that was built did not provide a large space for the involvement of the Balinese people as a whole. The reformation era in Indonesia should be able to change all of that. Canggu Village through the presence of nomadic tourists has given a different color in building a tourism policy model in Bali that is more nuanced in the community centered model. Although the policy is not yet fully community centered model, at least the tourism phenomenon that occurs in Canggu village with the village government's policy has given indications of better public policy deliberation patterns in the present and the future.*

Keywords: *Policy, Tourism, Deliberation, Canggu*

## Pendahuluan

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai desa wisata di Bali yang pengembangannya didasarkan pada deliberasi penguatan terhadap masyarakat, sehingga hal ini memberi contoh bahwa kebijakan pembangunan pariwisata yang bersifat deliberatif akan lebih kuat menghadapi tantangan global ketimbang kebijakan yang bersifat sentralistik (kebijakan dari pusat). Hal itu seperti kebijakan pariwisata di Bali yang secara historis sebagai daerah pariwisata yang diciptakan – A Paradise Created (Vickers, 2012) - berorientasi pada kebijakan pariwisata yang diciptakan oleh pemerintah pusat. – yang akhirnya berdampak buruk di era pandemik Covid 19.

Kajian terhadap dinamika turisme yang ada di desa Canggu, Bali, dengan salah satu model turisnya yaitu *Nomadic Tourism* (NT) serta model kebijakan dan tata kelola pariwisata di desa tersebut diharapkan dapat menemukan *pendulum swing* model kebijakan pariwisata yang berorientasi dari *state centered administration model* kepada *community centered model*. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa model kebijakan yang berorientasi pada *community centered administration* lebih tepat untuk menghadapi tantangan global yang datang di daerah-daerah

pariwisata. Hal ini juga ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa pendekatan kebijakan publik yang bersifat *deliberative* menjadi sangat signifikan dalam mencegah bencana dan masalah yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *deliberative policy analysis* akan menjadi fokus utama penelitian ini.

Penelitian secara mendalam mengenai NT telah dilakukan oleh beberapa akademisi dalam penelitian mereka seperti kajian push dan pull factors kehadiran NT di Canggu Bali (Prabawa & Pertiwi, 2020; Mahadewi, 2019), begitu juga kajian mengenai peran pemangku kepentingan dalam mengadopsi berbagai kepentingan NT di Grand Canaria , Spanyol (Hannonen et al., 2023). Penelitian yang lebih bersifat spesifik juga dilakukan oleh (Chevtaeva, E., & Denizci.Guillet, 2021) dalam kaitnnya dengan peran ruang kerja yang dibutuhkan oleh para NT. Hal ini menarik karena peran ruang kerja dianggap memberikan kenyamanan dalam berinteraksi dan bekerja dalam sebagai NT. Selain itu juga terdapat penelitian dari Cook (Cook, 2023) yang lebih menfokuskan pada defines dan taxonomi mengenai para Digital Nomad atau NT yang mengklasifikasikan mereka menjadi beberapa kategori seperti (1) freelance digital nomad, (2) digital nomad business owners; (3) salaried digital nomads; (4) experimental digital nomads and (5) armchair digital nomads.

Kajian Agung Suryawan (Agung Suryawan Wiranatha, et.al., 2019; Rakhmadi, 2022) mengenai digital nomad yang ada di Ubud dan Canggu dan Indonesia pada umumnya juga telah memberikan kontribusi terhadap analisa keberadaa turis-turis model baru ini di Bali, dengan foku pada identifikasi, persepsi dan pandangan para NT terhadap destinasi di mana mereka berada.

Penelitian-penelitian di atas menunjukan bahwa keberadaan NT telah menjadi perhatian yang serius dalam perkembangan pariwisata, khususnya di Bali, khususnya di desa Canggu. Penelitian ini ingin memberikan sumbangan pemikiran khusus pada isu deliberatif kebijakandi desa tersebut, dengan pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah kehadiran NT yang begitu besar di desa Canggu berpengaruh terhadap model perumusan kebijakan pariwisata yang lebih berorientasi kepada community centered model (deliberative)?

## **Research Method**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada deskripsi kualitatif, di mana melalui wawancara, studi literatur yang teoretik didiskusikan secara mendalam guna menemukan isu-isu terkait dengan keberadaan NT, isu-isu lokal dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa di Canggu.

Wawancara dilakukan secara terbuka (wawancara tidak terstruktur). Model wawancara ini digunakan guna mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah desa, tekanan-tekanan yang mereka hadapi, dan rencana-rencana tata ruang desa sebagai dasar pembangunan daerah. Selain itu juga mengacu pada konsep dan analisis kebijakan deliberasi dari Maarten Hajer and Hendrik Wagenaar (Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar, 2003) yang sangat bernuansa post-positivistik, wawancara terbuka ini diarahkan untuk melihat isu-isu diseputar:

1. The new spaces of politics – pembahasan ruang politik yang berubah. Memaparkan bahwa ada ruang-ruang politik yang berubah di dalam konteks sosial. Ruang politik ini bisa mengisi model- model kebijakan yang akan diambil. Konsep perubahan politik ini dapat menjadi analisa mengenai konsep pariwisata di Bali dalam era politik kolonialisme sampai Era Reformasi. Seberapa besar perubahan ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata di Bali, dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah (lokal) di Canggu.

2. Politics and policymaking under the condition of radical

uncertainty – pembahasan mengenai perumusan kebijakan politik di era ketidakpastian (dalam konteks ini dihubungkan dengan Covid-19). Bagaimana pemerintah lokal di Canggu merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, khususnya dalam dua tahun terakhir ini (di era Covid-19)

3. The increased importance of ‘difference’ for our understanding of politics (dinamika heterogenitas di dalam masyarakat). Seberapa besar pengaruh heterogenitas di Canggu mempengaruhi daya dorong pariwisata berbasis lokalitas.

4. Acting upon an awareness of interdependence (munculnya kesalingtergantungan satu dengan yang lainnya). Kepentingan ekonomi politik yang saling tergantung akan memudahkan mengurangi konflik dan tetap menjaga keseimbangan secara natural. Berkelindannya beragam kepentingan yang ada di Canggu sekiranya dapat menjadi “kekuatan” yang dapat menjelaskan perubahan dan kemajuan pariwisata di Canggu.

5. Policymaking and the dynamics of trust and identity (kepercayaan dan identitas).

Kepercayaan dan identitas adalah bagian yang terpenting dalam sebuah perumusan kebijakan dalam perspektif deliberatif.

Wawancara ini dilakukan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Bidang Urusan Pembangunan dan kepada seorang petani di daerah Canggu. Wawancara juga dilakukan kepada Michael Craig, salah satu pengelola cafe berwarna negara asing yang sudah cukup lama bekerja di Canggu, dan banyak bertemu dengan para turis nomad selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir.

### **Diskusi**

Desa Canggu, Bali, adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan NT-nya. Menurut informasi resmi dari website *nomadlist.com*, Canggu adalah *top rank* untuk destinasi wisata dunia khusus untuk NT. Hampir semua variabel ukuran kenyamanan yang ditawarkan bernilai *Okay* hingga *Great* (ditandai dengan warna kuning hingga hijau). Hanya dua item saja yang berwarna merah (bad) yaitu *Traffic Safety* dan *Healthcare*. Website ini memberikan

pembandingan dengan negara-negara di seluruh dunia mengenai tingkat kenyamanan berwisata dalam konteks NT. Hal ini menunjukkan bahwa konteks Canggu sebagai desa wisata di Bali dapat terus eksis dan dikunjungi banyak orang, khususnya para turis NT, meskipun terdapat bencana besar (khususnya pandemic Covid-19).

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah rezim administrasi Presiden Soeharto di Indonesia telah mengubah banyak hal terkait dengan tata kelola kenegaraan di Indonesia. Konteks (ekonomi) politik yang berubah berdampak pada perubahan-perubahan kebijakan termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan pariwisata (Mudana et al., 2018; Vickers, 2012; Sylvine Pickel-Chevalier Editor, 2017). Hal itu tentu berdampak kepada Bali sebagai daerah pariwisata utama di Indonesia. Secara umum Bali berhadapan langsung dengan konsep-konsep neoliberalisme yang terparap luas untuk dieksplorasi dan juga dieksploitasi oleh kekuatan kapitalisme. Ini bukan hanya sebuah kecemasan tetapi juga sebuah realita.

Hingga September 2022

diperkirakan sudah ada 3000-an pengguna visa B211A, yaitu visa yang dilekuarkan bagi turis-turis yang berstatus NT. Visa ini diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pariwisata, khususnya bagi Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Meski arus diakui adanya visa ini tidak secara otomatis selalu berdampak positif (Indrady, 2020; Pujiharini & Ichihashi, 2016). Kemudahan masuknya para NT di satu sisi berdampak positif tetapi sejalan dengan waktu hal ini justru menimbulkan persoalan. Wawancara mendalam dengan Michael Craig, seorang pemilik Dojo Bali Co-Working yang telah bekerja lebih dari sepuluh tahun di desa Canggu, mengatakan bahwa para NT awalnya adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap lingkungan dan hanya bekerja dan menikmati hidup. Tetapi belakangan ini keberadaan NT ini tampaknya sudah berubah banyak karena mereka bukan saja ingin menikmati bekerja di Bali tetapi juga mau tinggal dan memiliki properti-properti di Bali. Dengan demikian mereka berusaha untuk memiliki

tanah dan membangun villa-villa atau homestay sebagai tempat mereka tinggal. Menurutnya, sepuluh tahun yang lalu para NT ini memiliki jiwa sosial yang tinggi sekali untuk membangun Bali, khususnya Canggu. Hal itu dieskrpesikan melalui keikutsertaan mereka berpartisipasi dalam program-program sosial Dojo Bali Co-Working untuk membantu masyarakat Bali dan Canggu secara khusus. Sekitar 50% para NT yang tinggal di Canggu ingin melakukan hal itu. Tetapi menurutnya, akhir-akhirini hanya sekitar 20% NT ini yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial dan selebihnya mereka cenderung tidak peduli terhadap keadaan Canggu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan NT akhir-akhir bukan saja memberikan dampak yang signifikan bagi keberadaan ekonomi di Bali, dan desa Canggu secara khusus, tetapi juga sedikit banyak mulai menimbulkan persoalan. Persoalan ini muncul khususnya dalam hal eksistensi NT ini dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dll. Dengan demikian kebijakan Visa B211A harus dilihat dalam perspektif yang

lebih luas terkait dengan kepentingan ekonomi pariwisata yang berdampak pada masyarakat lokal. Mass tourism adalah sebuah petaka ketika tidak diimbangi dengan kesiapan-kesiapan infrastruktur, kebijakan dan aturan-aturan yang kuat serta kesiapan dari masyarakat untuk menerima perbedaan dan perubahan.

Dari sisi kebijakan daerah, informasi melalui wawancara mendalam dengan Kepala Urusan Pembangunan Desa Canggu (Ni Luh Desy Natalina), menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah desa tidak mudah untuk melakukan *bergaining position* berhadapan dengan pemilik modal besar untuk berinvestasi di Desa Canggu. Sebagian dari mereka adalah juga para NT. Mengatasi hal ini, cara yang kemudian digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan “Kebijakan Tiga Ruang”. Pembagian ruang geografis menjadi tiga bagian, Canggu Selatan (hotel-hotel), Canggu Tengah (mini market, cafe, pantai, homestay, dll) dan Canggu Utara (pertanian, homestay). Ketiga ruang ini dalam rancangan pembangunan desa sebenarnya menjadi prioritas yang sangat ketat.

Namun demikian sering kali terjadi tawar menawar dari para investor untuk membangun di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan rancangan ruang pembangunan desa. Di sini isu perijinan dan pajak menjadi sangat ketat dan penuh dengan kepentingan. Salah satu usaha desa yang sangat penting adalah kebijakan pembebasan pajak bagi pertanian. Kebijakan ini diambil agar kesadaran masyarakat mengenai pembangunan agrobisnis/pertanian menjadi semakin kuat. Subsidi-subsidi pupuk dan bantuan dana desa terhadap kegiatan pertanian (dan juga kelautan) merupakan salah satu prioritas pemerintah desa Canggu. Hal ini lebih terasa lagi ketika memasuki masa-masa sulit di era pandemik. Banyak masyarakat yang tadinya bekerja di bidang pariwisata kemudian berbalik haluan kembali pada pertanian. Meskipun ini bersifat kasuistik tetapi hal ini menjadi penanda bahwa pertanian merupakan alternatif yang kuat untuk menjadi pertahanan sosial menopang ekonomi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penyampaian Kepala Urusan Pembangunan Desa Canggu (Ni Luh Desy Natalina) yang

mengungkapkan bahwa di era pandemik keberadaan masyarakat desa Canggu adalah yang paling stabil menghadapi isu pandemik. Hal ini menurutnya karena ditopang oleh kegiatan dan aktifitas perekonomian agrobisnis yaitu pertanian. Meski demikian tantangan untuk mempertahankan lahan-lahan pertanian sampai saat ini menjadi isu yang sangat krusial. Pemerintah desa Canggu secara serius memfokuskan kebijakan-kebijakannya untuk mempertahankan daerah dengan basis pertanian ini agar tetap eksis dan kuat. Tantangan terbesar adalah masalah ekonomi masyarakat. Menurut Natalina, ada kasus-kasus di masyarakat yang menghendaki agar menjual tanah-tanahnya kepada investor (*nota bene* dari Jakarta bahan dari luar negeri) dan diganti dengan kegiatan-kegiatan pariwisata yang dianggap cepat mendatangkan keuntungan, misalnya dengan membangun hotel-hotel besar. Namun demikian pemerintah desa Canggu sangat ketat untuk memberikan perijinan terkait dengan hal itu, khususnya di bagian utara Canggu yang memang secara umum peruntukannya lebih pada

pertanian/agrobisnis.

Perkembangan yang justru terjadi adalah semakin maraknya *homestay/ villa* sebagai alternatif tempat tinggal, tetapi berkualitas, murah dan bernuansa eksotik bagi pengunjung.

Pengembangan *homestay* ini menjadi potensi yang besar karena merupakan usaha membangun keikutsertaan masyarakat dalam merespon kehadiran turis-turis manca negara khususnya para NT. Pembangunan *homestay/villa* oleh masyarakat merupakan model yang bisa dikatakan bersifat *bottom up*, dimana selama ini fasilitas dan infrastruktur pariwisata selalu dilihat sebagai berbiaya besar dan hanya dimiliki oleh para investor. Namun demikian, kesederhanaan, kebersihan dan keramahtamahan masyarakat di Canggu dalam penerimaan turis manca negara dan lokal untuk tinggal di *homestay/villa* mereka telah membuktikan bahwa gerak pariwisata tidak selalu harus dimulai dengan modal serta investasi yang besar. Meski untuk membangun sebuah *homestay* memerlukan biaya yang tidak sedikit tetapi hal itu tidak

sebanding dengan pembangunan hotel mewah yang sering kali keberadaannya tidak melibatkan masyarakat di sekitarnya. Penelitian dari I Nyoman Sudiarta dan I Gusti Ayu Eka Suwintari (Sudiarta & Suwintari, 2020; S.Kumaran, T.Milton, 2022) memberikan gambaran bahwa keberadaan *homestay/villa* adalah sebuah usaha membangun masyarakat dalam konteks pertumbuhan ekonomi pariwisata di Bali yang selama ini cenderung hanya dinikmati oleh segelintir/kelompok orang. Namun pada sisi lain, pembangunan *homestay* juga harus diwaspadai karena akan terjadi perubahan- perubahan fungsi lahan yang sangat besar di sekitar Canggu, khususnya di wilayah Canggu bagian utara (Suamba et al., 2022; Rimba et al., 2020). Hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah ketika diperhadapkan pada usaha mempertahankan sektor pertanian di wilayah pariwisata.

Usaha membangun kebijakan pertanian menurut Sekretaris Pemerintahan Desa Canggu, Wayan Mertha Wijaya Kusuma, bukan saja sekedar kebijakan akibat dampak pandemi



yang terjadi, meskipun hal itu disadari sebagai salah satu pendorongnya. Tetapi hal ini lebih didasarkan pada kesadaran sejarah pariwisata yang ada di Bali itu sendiri (Agung Wardana, 2019). Meskipun Kusuma tidak secara langsung mengatakan kebijakan pertanian di desa Canggu sebagai usaha melawan kapitalisme global yang berusaha menggerus lahan-lahan di desa Canggu tetapi hal ini sebenarnya mengindikasikan adanya “perlawanan” terhadap gerak kapitalisme yang berusaha menggerus Bali, dalam hal ini desa Canggu, untuk beralih sepenuhnya dari aktifitas *mass tourism*. Oleh sebab itu Kusuma menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah desa secara khusus di era pandemik dan “pasca” pandemik ini adalah konsisten dengan kebijakan agro industri, khususnya mempertahankan wilayah di Canggu utara. Usaha kebijakan itu dilakukan dengan membangun sistem guna mencapai hal yang diharapkan. Pada masa pandemi dengan cara membagikan bibit, pupuk bersubsidi, tetapi juga dengan bantuan membangun sistem penjualan hasil pertanian (khususnya padi dan gabah) dengan bekerja sama

dengan “pihak ketiga”. “Pihak ketiga” ini adalah pihak yang secara resmi ditunjuk untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah desa yang bertujuan mencegah larinya petani kepada para tengkulak untuk menjual hasil pertaniannya. “Pihak ketiga” ini secara resmi dituangkan dalam kebijakan pemerintah desa sebagai salah satu cara untuk mengembangkan usaha pertanian masyarakat, yang juga merupakan tantangan terbesar dari pemerintahan desa di Canggu.

Selain itu, mengembalikan fungsi subak adalah salah satu cara yang harus dilakukan secara formal melalui kebijakan pemerintah desa agar keberadaan subak menjadi salah satu penopang penting dalam peningkatan kualitas hasil pertanian (terkait dengan air) (Sriartha et al., 2015; Purnamawati et al., 2022). Pemerintah desa Canggu dalam hal ini mengeluarkan kebijakan dalam bentuk anggaran guna membangun infrastruktur subak berupa jalan usaha tani (JUT). Pembangunan jalan usaha tani subak Uma desa ini tidak hanya mempermudah akses transportasi petani dalam melakukan kegiatan pertanian dan pemasaran

hasil pertanian. Jalan tersebut juga bisa dimanfaatkan warga setempat maupun wisatawan sebagai trek jogging sembari menikmati pemandangan hamparan sawah hijau di sekelilingnya. Menurut pemaparan Kusuma selanjutnya, sejalan dengan pembangunan subak ini memang terdapat juga pembangunan infrastruktur pariwisata yang dilakukan oleh investor. Namun karena dalam perjalanannya kondisi pembangunan tidak sesuai dengan konteks ekologis yang ditawarkan sejak awal, maka pemerintah desa Canggu bersama desa adat secara berani menghentikan pembangunan tersebut. Ini menjadi usaha perlawanan yang berarti bagi investor-investor besar yang mencoba membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam kebijakan-kebijakan tata ruang yang ada di pemerintahan desa di Canggu. Usaha ini banyak diapresiasi oleh masyarakat.

Pada sisi lain kehadiran para NT telah memberi warna baru dalam konteks kehidupan masyarakat di Canggu. Tidak seperti destinasi wisata lainnya di Bali (misalnya

Kuta, Nusa Dua, Sanur), model NT yang ada di Canggu cenderung berada bersama dalam komunitas masyarakat lokal. Oleh sebab itu interaksi dan heterogenitas menjadi sangat tinggi dengan beragama masalah sosial yang ada. Salah satunya adalah ketika ketika masyarakat Canggu melakukan protes atas kebisingan suara yang terjadi akhir-akhir ini . Di mana masyarakat bersama desa adat melakukan protes dan mengajukan petisi terhadap polusi suara yang terjadi melalui cafe besar di sekitar Canggu (Riri Rahayu, 2022). Dalam kaitannya dengan protes yang terjadi akibat kebisingan suara tersebut, hal itu paling tidak dapat dilihat dalam dua hal: *pertama*, adanya kesadaran bahwa masyarakat memiliki *power* untuk melakukan *bergaining position* terhadap model pembangunan pariwisata di Bali, Canggu secara khusus. Hal ini ditandai dengan sikap berani untuk menentang kebijakan turisme yang mengakibatkan munculnya akibat negatif dari kebijakan turisme, yaitu polusi suara. *Kedua*, hal ini dapat dilihat sebagai masih kuatnya usaha kapitalisasi pariwisata di Bali di mana

pemerintah – khususnya pemerintah desa di Canggu – belum sepenuhnya mampu menghadapi besarnya kekuatan kapitalisme yang dapat memberangus nilai-nilai baik yang sudah dibangun selama ini dalam bidang pariwisata di Canggu yang berbasis lokalitas. Kehadiran para NT (dan semua turis yang ada di desa Canggu) telah membuat desa ini kuatir akan adanya perubahan kebudayaan, nilai-nilai, pola-pola kehidupandan sosial. Tetapi pada sisi lain hal itu membawa *trickle down effect* yang menguntungkan bagi perekonomian akibat pariwisata di desa Canggu secara umum. Pada sisi ini, meminjam istilah D’Andrea, kehadiran para “ekspatriat ekspresif” ini (NT) (D’Andrea, 2006) adalah sebuah fenomena global, dengan kekuatan dan pengaruh global yang kuat, yang sedikit banyak telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di Canggu, tetapi juga telah membuka ruang politik yang kuat atas nama kepentingan global yang mampu menekan kekuatan politik lokal melalui gerakan ekonomi liberal. Artinya, apakah protes kebisingan itu akan menghasikan kebijakan yang jelas

bagi masyarakat di desa Canggu? Pada kenyataanya kebijakan mengenai kebisingan ini hanya bersifat dramatical dan sensasi semata. Tidak akan bisa menghilangkan apa yang disebut dengan kebutuhan pasar global dalam industri pariwisata yaitu kesenangan tanpa batas. Pada sisi ini maka ruang-ruang ekonomi politik dalam usaha membangun keijakan pariwisata di Canggu mengalami dua muka. Pada satu sisi betumbuh dari bawah ke atas, tetapi pada sisi lain tetap menghadapi kekuatan mondial (pusat, Jakarta, kelompok kapitalis global) yang setiap saat berusaha mengambil keuntungan dari situasi seperti yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan desa di Canggu. Pada akhirnya persoalan heterogenitas sosial ini berhimpitan dengan beragam isu-isu lainnya yang sangat kompleks.

Hal itu juga dikemukakan oleh Sekretaris Permerintahan Desa Canggu, Wayan Mertha Wijaya Kusuma, ada kasus-kasus heterogenitas yang berupa riak-riak kecil dalam konteks perebutan “lahan” ekonomi. Misalnya suatu kali di desa Canggu pernah

dihasilkan oleh keberadaan bisnis *money changer* yang dalam menjalankan bisnisnya terdapat kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya tamu-tamu asing. Hal ini dilaporkan kemudian ditindaklanjuti dengan cara sidak ke kios-kios *money changer*, yang sebagian besar bisnis tersebut dijalankan oleh masyarakat dari luar daerah Bali. Kasus ini hampir merebak sebagai kasus rasialis. Namun kemudian pemerintah desa memberikan sanksi yang keras melalui kebijakan daerahnya sehingga hal itu tidak menimbulkan efek rasialisme di wilayah desa Canggu. Kasus ini tampaknya hanya merupakan kasus kecil dalam konteks perekonomian masyarakat tetapi jika tidak ditangani dengan serius maka bisa berdampak pada hal-hal yang lebih besar khususnya masalah rasialisme.

### **Simpulan**

Kehadiran NT di Bali, khususnya di desa Canggu adalah sebuah keuntungan yang besar bagi masyarakat desa tersebut. Di era

pandemik perekonomian desa ini tetap stabil dibanding dengan daerah-daerah pariwisata lainnya di Bali. Desa Canggu adalah salah satu surga bagi para NT. Ruang-ruang politik (*the new spaces of politics*) yang berubah di Indonesia, khususnya di era reformasi telah memberi pengaruh pada dimensi ekonomi politik. Usaha masyarakat dan pemerintah desa Canggu mengedepankan pertanian sebagai salah satu prioritas programnya, dengan cara menetapkan “kebijakan tiga wilayah” telah memberikan “ruang hirup udara yang segar” bagi para turis, khususnya para NT, untuk menikmati keindahan wisata Canggu. Meski masih begitu banyak persoalan dan dinamika ekonomi politik khususnya bagaimana pemerintah desa Canggu menghadapi kekuatan kapitalisme yang senantiasa menginginkan seluruh wilayah Canggu menjadi destinasi wisata *ala mass tourism* – dengan segala infrastruktur yang ada di dalamnya – tetapi hal itu sampai hari ini masih dapat di atas dengan “kebijakan tiga wilayah” yang menjadi konsentrasi pemerintah di desa Canggu. Dalam konteks pendemik hal ini juga

merupakan salah satu cara untuk bertahan menghadapi suasana ketidakpastian yang terjadi secara global, nasional maupun lokal (*Politics and policymaking under the condition of radical uncertainty*). Hal ini ditunjukkan dari eksistensi desa Cangu selama era pandemi masih saja terdapat turis-turis internasional maupun lokal (khususnya para NT), tentu dengan protokol kesehatan yang ada.

Tingkat heterogenitas yang tinggi, secara historis memiliki ketegangannya sendiri. Tetapi sejalan waktu hal ini memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat untuk terus mengadaptasi dan bertemu di ruang publik untuk saling menghargai dan menghormati (*The increased importance of 'difference' for our understanding of politics - Policymaking and the dynamics of trust and identity*). Dinamika konflik di ubah menjadi sebuah tatanan keberagaman, meski tidak mengabaikan bahwa ada hal yang krusial yaitu penghargaan terhadap identitas yang jika salah dipahami dapat menimbulkan isu-isu yang bersifat rasialis. Kebijakan adil pemerintah desa (desa dinas) dalam

hal distribusi kesejahteraan masyarakat di Cangu telah memberikan dampak psikologi sosial bagi suasana ramah dan damai di ruang publik, di mana hal ini dicari dan ingin dinikmati oleh para turis khususnya para NT. Pada sisi lain hal itu secara langsung telah memberikan suasana saling ketergantungan di antara pemerintah desa, masyarakat desa, para turis (NT) untuk terus merasakan kenyamanan dalam melakukan aktifitas keseharian dan juga aktifitas pariwisata.

Mungkin masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sudah terjadi pergeseran pola kebijakan pariwisata Bali, dari kebijakan yang bersifat *state centered model* menjadi *community centered model*. Tetapi di balik itu semua itu semua, dalam kajian di atas, tampak ada sebuah pergeseran-pergeseran yang signifikan terhadap pola-pola politik pariwisata. Kasus daerah Cangu seharusnya dapat dilihat sebagai momentum perubahan model politik pariwisata di Bali yang tata kelola dan kebijakannya berorientasi *community centered model*. Kreativitas pemerintah desa dan

masyarakat merespon perubahan dianggap dapat dilihat sebagai cara untuk menciptakan pariwisata itu pada dirinya sendiri dan tidak tergantung semata dari (pemerintah) pusat/daerah. Inimenunjukkan bahwa terjadi pergeseran pola (pendulum swing) yang signifikan yang justru memperkuat basis pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Terjadinya protes dari masyarakat adalah sebuah tanda bahwa masih terdapat masalah dalam proses perumusan kebijakan pariwisata di Cangu. Seperti sudah disampaikan di atas, protes tersebut dapat dilihat dalam dua sisi yaitu sisi kekuatan masyarakat dalam merespon ketidakadilan (polusi suara) tetapi juga dapat dilihat masih lemahnya pemerintah desa dalam menghadapi kekuatan kapitalisme pariwisata.

Melihat hal tersebut, sekiranya pemerintah desa Cangu dapat memperkuat visi dan misinya melalui usah melibatkan masyarakat sebesar mungkin dalam setiap proses perumusan dan pengambilan keputusan. Seperti dipahami bahwa demokrasi dan kekuasaan adalah dua

hal yang berkelindan satu dengan yang lainnya (Nicole Curato & Min, 2019). Pada satu sisi ia mengkritik kekuasaan tetapi pada sisi lain ia juga membentuk sebuah kekuasaan baru. Oleh sebab itu diperlukan norma, forum dan sistem untuk mengukur bagaimana relasi keduanya berjalan dengan baik. Normatif demokrasi dikonstruksi sedemikian rupa guna membentuk norma-norma yang menjadi acuan dalam berdemokrasi. Hal tersebut dirancang berdasarkan *political aspiration* yang nantinya akan menjadi sebuah tatanan atau acuan bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Pada sisi lain forum menjadi sesuatu yang yang penting dalam perspektif deliberasi demokrasi mengingat bahwa forum atau *mini-publics* ini menjadi cara untuk melakukan redistribusi kekuasaan politik yang dinamis. Pada sisi ini deliberasi demokrasi dan politik menjadi dua hal yang senantiasa tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem dibuat berdasarkan kepentingan bersama dan untuk kemaslahatan bersama.

Pada sisi ini kemudian saran

terpenting bagi pemerintahan desa Canggü adalah tetap menciptakan norma-norma kebijakan yang bersumber melalui inspirasi dalam forum-forum publik yang berujung pada membangun sistem yang kuat di masa depan. Hal itu tentunya akan menguatkan model perumusan dan kebijakan pemerintahan desa yang deliberative dan demokratis.

## Referensi

- Agung Wardana. (2019). Contemporary Bali: Contested Space and Governance. In *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2478-9>
- Chevtäeva, E., & Denizci.Guillet, B. (2021). Digital Nomads' Lifestyles and Coworkation. *Journal of Destination Marketing & Management*, 21. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212571X21000810>
- Cook, D. (2023). What is a Digital Nomad? Definition and Taxonomy in the Era of Mainstream Remote Work. *World Leisure Journal*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>
- D'Andrea, A. (2006). Neo-nomadism: A theory of post-identitarian mobility in the global age. *Mobilities*, 1(1), 95–119. <https://doi.org/10.1080/17450100500489148>
- Curato, N., Hammond, M., Min., JB. (2019). Power in Deliberative Democracy : Norms, Forums, Systems, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland.
- Hannonen, O., Aguiar Quintana, T., & Lehto, X. Y. (2023). A supplier side view of digital nomadism: The case of destination Gran Canaria. *Tourism Management*, 97(March), 104744. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104744>
- Indrady, A. (2020). A Critical Assessment on the Indonesian Free Visa Policy: a Neorealist Perspective. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 54. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.414>
- Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar. (2003). DELIBERATIVE POLICY ANALYSIS Understanding Governance in the Network Society. In Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar (Ed.), *Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge, United Kingdom Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York*. Cambridge University Press.
- Mahadewi, N. M. E. (2019). Nomadic tourism, education tourism, digital tourism and event tourism for sustainable tourism. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 360–367.
- Mudana, I. G., Suamba, I. B. P., Putra, I. M. A., & Ardini, N. W. (2018). Practices of Bali Tourism Development, Threefolding, and Tri Hita Karana Local Knowledge in New Order Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742->

6596/953/1/012108

- Nicole Curato, M. H., & Min, J. B. (2019). *Power in Deliberative Democracy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-95534-6>
- Pujiharini, F., & Ichihashi, M. (2016). The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia. *IDEA DP2 Series*, 6(5), 1–24. <https://core.ac.uk/download/pdf/222957884.pdf>
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, N. K. S. (2022). The Role Analysis of the Physical Environment, Socio-Economic, and the Urgency of Tat Tvam Asi in Collective Resource Management Multicultural Subak. *Asia Pacific Management and Business Application*, 011(01), 19–36. <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2022.011.01.2>
- Rakhmadi, R. (2022). Role of Digital Nomad in Supporting Tourism in Indonesia: Case Study Bali. *Proceedings of the 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021)*, 606(Iicis), 143–148. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.020>
- Rimba, A. B., Atmaja, T., Mohan, G., Chapagain, S. K., Arumansawang, A., Payus, C., & Fukushi, K. (2020). Identifying land use and land cover (LULC) change from 2000 to 2025 driven by tourism growth: A study case in Bali. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 43(B3), 1621–1627. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2020-1621-2020>
- Riri Rahayu. (2022). *Sandiaga Uno Responds to Online Petition Against Bali's Canggu's Unbearable Noise Pollution*. Tempo.Co. <https://en.tempo.co/read/1634986/sandiaga-uno-responds-to-online-petition-against-balis-canggu-unbearable-noise-pollution>
- S.Kumaran, T.Milton, R. K. (2022). *Homestay Operations In Bali, Indonesia: An International Tourists Perception*. 05, 553–567. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4S8Z3>
- Sriartha, I. P., Suratman, S., & Giyarsih, S. R. (2015). The Effect of Regional Development on The Sustainability of Local Irrigation System (A Case of Subak System in Badung Regency, Bali Province). *Forum Geografi*, 29(1), 31–40. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v29i1.789>
- Suamba, I. B. S., Wiryasa, N. M. A., Dwijendra, N. K. A., & Putra, I. D. G. A. D. (2022). Characteristics and deviation patterns of agricultural land use in tourism area of Canggu, Bali, Indonesia. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 20(2), 423–430. <https://doi.org/10.22124/cjes.2022.5591>
- Sudiarta, I. N., & Suwintari, I. G. A. E. (2020). Pengaruh Pelayanan Dan Fasilitas Homestay Canggu Terhadap Kepuasan Backpacker. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 11(1), 24–35. <https://doi.org/10.22334/jihm.v11i1.174>
- Sukma Winarya Prabawa, I. W., & Ratih Pertiwi, P. (2020). The Digital Nomad Tourist Motivation in Bali: Exploratory Research Based on Push



and Pull Theory. *Athens Journal of Tourism*, 7(3), 161–174.  
<https://doi.org/10.30958/ajt.7-3-3>

Sylvine Pickel-Chevalier Editor. (2017). *Tourism in Bali and the challenge of*

*sustainable development*. 186.

Vickers, A. (2012). *Bali A Paradise Created by Adrian Vickers (z-lib.org).epub*. Tuttle Publishing.